

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang *Listing* di
BEI 2014-2018)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Atidira Darmesti

No. Mahasiswa: 16312025

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan
yang *Listing* di BEI 2014-2018)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Atidira Darmesti

No. Mahasiswa: 16312025

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku. ”

Yogyakarta, 11 Februari 2020

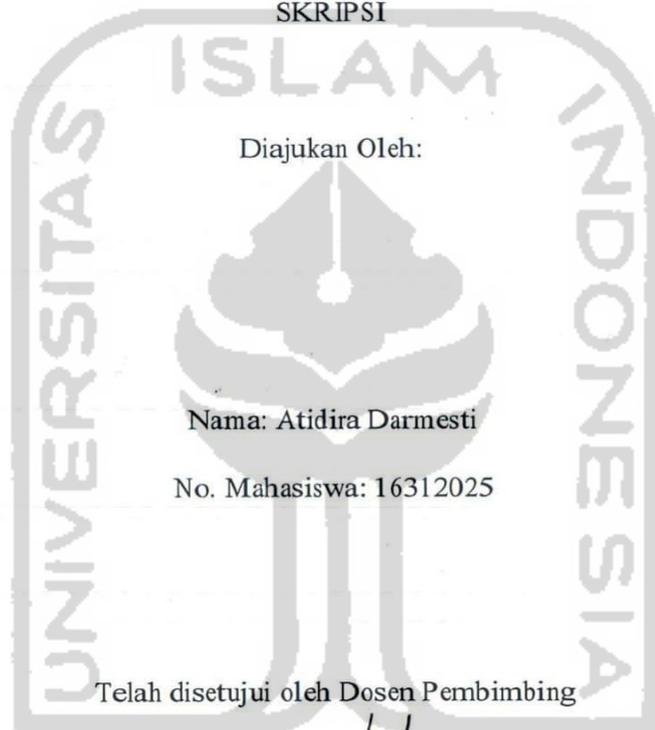
Penulis,



(Atidira Darmesti)

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan
yang *Listing* di BEI 2014-2018)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama: Atidira Darmesti

No. Mahasiswa: 16312025

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 5/2/2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sigit Handoyo', is written over the text 'Dosen Pembimbing,'.

(Sigit Handoyo, S.E. M.Bus.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN
LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Disusun Oleh : **ATIDIRA DARMESTI**

Nomor Mahasiswa : **16312025**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 12 Maret 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Sigit Handoyo, SE., M.Bus**

Penguji : **Reni Yendrawati, Dra., M.Si.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Snyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Periode 2014-2018)” ini. Tak lupa shalawat serta salam dijunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah mengantarkan umatnya menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam proses menyusun skripsi ini tentunya ada banyak hambatan, namun itu semua dapat penulis lewati dengan usaha, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nur Heru Yunarta dan Ibu Rusmini, selaku kedua orang tua penulis, yang selalu memberi nasihat, mendukung baik fisik dan mental, memahami, mempercayai, menghargai setiap usaha yang penulis lakukan tanpa pernah memaksakan, dan selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih banyak.
2. Andhika Paramastri, selaku kakak kandung penulis, walaupun berjauhan namun terima kasih karena selalu mendukung dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.Bus., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran selama proses penyusunan skripsi dan juga terima kasih atas kesabaran dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
7. Wardina Marshufah Fauzan Alyafi'i dan Nafisatul Ummah Oktarini, selaku sahabat penulis yang selalu bersama sejak hari pertama kuliah di FBE UII, disaat senang dan sedih, saling mendukung, membantu, dan mendo'akan, terima kasih, ya.
8. Raden Doan Satria Dwi Putra, Rafiq Maulana, Mohammad Naufal, Faris Azkarafi Priady, Arel Marellamahsa Fervibyuntasio, Wardina Alyafi'i dan Nafisatul Oktarini yang mengisi hari-hari kuliah penulis di FBE UII menjadi bersemangat dan tidak membosankan.
9. Teman-teman Tripyay, Saraswati, Qintan Prina Zaharani, Fandy Iswanto, Gitrafi Yuris Roihan, Wardina Alyafi'i dan Nafisatul Oktarini, yang mengajak jalan-jalan saat penulis sedang bosan.
10. Real Kelas A, keluarga pertama di FBE UII, terima kasih atas segala kenangannya, semoga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan kedepannya.

11. Lathifah Nur Aini Rahmawati dan Rifqi Setya, teman berjuang skripsi bersama, terima kasih sudah meyakinkan saat penulis merasa pesimis.
12. Agestya Puspita Sari, Zulfa Salsabila, Zahra Hanan Amany Shafa, Deraqina Choirunnisa, dan Muthi'a Rosyda, terimakasih sudah menjadi penyemangat dari jauh.
13. Dwi Lestari, Bella Megarani, Elfira Noor, Ratika Dian dan Fera Nanda Lia. Semoga diberikan diberikan kelancaran dan kesuksesan kedepannya.
14. Teman-teman KKN jurusan akuntansi, Bruno Mars Squad, Lathifah Nur Aini Rahmawati, Devani Meydiana Naulita, Audisa Noor Rahmawati, Asfita Prameswari yang telah menemani selama 1 bulan sehingga tidak terasa terlalu berat.
15. Teman-teman KKN Unit 190 yang telah menjadi keluarga 1 bulan sehingga KKN begitu menyenangkan, Cinderella Meilani Hasibuan, Dhanukhresna Hangga Yudhawan, dan Umam Maulana Jati yang mendukung dan membantu dari jauh. Serta Yeni Fadilah, Annisah Jofani Tanjung, Nandang Juni Pangesti, dan Hafiz Sya'bani Saka Aji yang mendukung dan menemani penulis dalam proses menyusun skripsi.
16. Teman-teman Brevet Angkatan 86, Ivana Mutia, Zulia Dian, Lathifah Rahma, Wulan, Firyal Aulia, Muhamad Nirwan, Mohammad Naufal, dan Doan Satria, yang menjadi tempat saling mengeluh setiap malam selama 3 bulan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Penulis,

(Atidira Darmesti)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	10
2.1.3 Teori Agensi	12
2.1.4 <i>Trade-off Theory</i>	13
2.1.5 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.6 Pertumbuhan Penjualan	19
2.1.7 <i>Leverage</i>	20
2.2 Telaah Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Hipotesis Penelitian	31
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31
2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35

2.3.5	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
2.3.6	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
2.3.7	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
2.4	Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Populasi Penelitian.....	40
3.2	Sampel dan Metode Pemilihan Sampel.....	40
3.3	Teknik Pengumpulan Data	41
3.4	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	41
3.4.1	<i>Tax Avoidance</i>	41
3.4.2	Dewan Komisaris Independen	42
3.4.3	Kepemilikan Institusional.....	42
3.4.4	Kepemilikan Manajerial	43
3.4.5	Komite Audit	43
3.4.6	Kualitas Audit.....	44
3.4.7	Pertumbuhan Penjualan	45
3.4.8	<i>Leverage</i>	45
3.5	Metode Analisis.....	46
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.3	Analisis Regresi Liner Berganda	48
3.5.4	Uji F/Uji Kelayakan Model	49
3.5.5	Koefisien Determinasi (R^2).....	49
3.5.6	Uji t	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Data Penelitian.....	50
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	55
4.3.1	Hasil Uji Normalitas	55
4.3.2	Hasil Uji Multikolinieritas	56
4.3.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	57
4.3.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
4.4	Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda.....	59
4.4.1	Hasil Uji F	59

4.4.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.4.3	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	61
4.5	Pembahasan.....	64
4.5.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	64
4.5.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	66
4.5.3	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	67
4.5.4	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	68
4.5.5	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	69
4.5.6	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	70
4.5.7	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	SIMPULAN	72
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN	73
5.3	SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Penelitian.....	39
--------------------------------	----



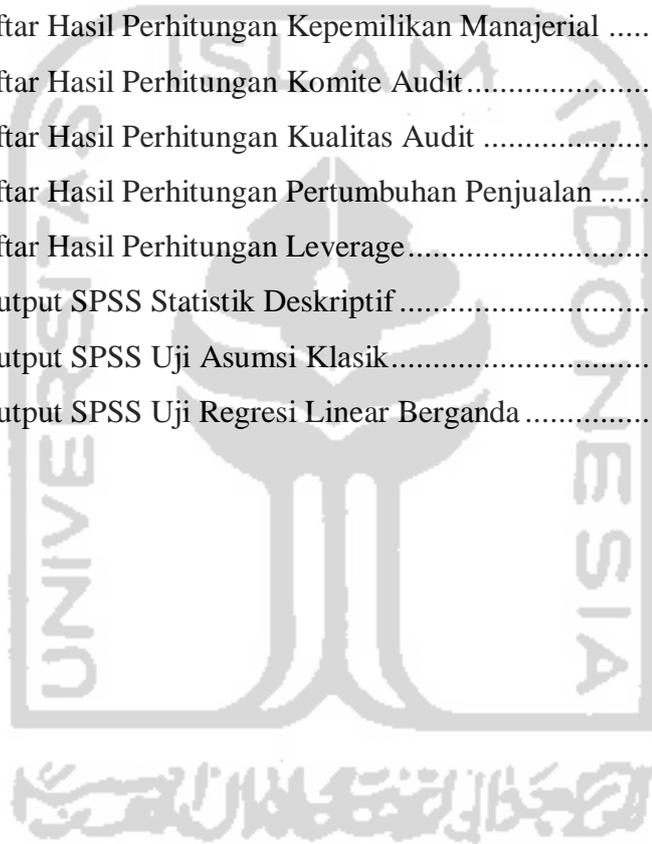
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4. 1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria.....	50
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Kualitas Audit	51
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linear Berganda	59
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	60
Tabel 4. 11 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Kode dan Nama Perusahaan	79
Lampiran 2: Daftar Hasil Perhitungan ETR.....	80
Lampiran 3: Daftar Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen	82
Lampiran 4: Daftar Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional	82
Lampiran 5: Daftar Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial	83
Lampiran 6: Daftar Hasil Perhitungan Komite Audit.....	83
Lampiran 7: Daftar Hasil Perhitungan Kualitas Audit	84
Lampiran 8: Daftar Hasil Perhitungan Pertumbuhan Penjualan	85
Lampiran 9: Daftar Hasil Perhitungan Leverage.....	86
Lampiran 10: Output SPSS Statistik Deskriptif	86
Lampiran 11: Output SPSS Uji Asumsi Klasik.....	87
Lampiran 12: Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda	88



ABSTRACT

This research aims to examine the influence of corporate governance, sales growth, and leverage on tax avoidance. Corporate governance divided into five, there are independent board of directors, institutional ownership, managerial ownership, audit committee, and audit quality. The sample are 16 firm-year observations from mining companies which are listed in Indonesia Stock Exchange during 2014-2018. The samples are selected by using purposive sampling. This research used descriptive statistical test, classic assumption test, and multiple linear regression test using IBM SPSS Statistics V.21. The results shows that the independent board of commissioners, institutional ownership, audit quality, sales growth, and leverage have no effect on tax avoidance while managerial ownership and the audit committee have a positive effect on tax avoidance.

Keywords: *independent board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit quality, sales growth, leverage, tax avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* dibagi menjadi lima, yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda dengan menggunakan IBM SPSS Statistics V.21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, *leverage*, *tax avoidance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga penerimaan tersebut, yang terbesar adalah penerimaan pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rata-rata realisasi kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 sebesar 84.26%. Dari data tersebut dapat dikatakan realisasi APBN belum maksimal. Terlihat bahwa penerimaan pajak yang menjadi pilar utama pendapatan negara belum optimal. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu kendala dalam pengoptimalan penerimaan pajak, karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Dari segi pemerintah, pajak merupakan potensi pendapatan negara yang terbesar. Namun, dari segi perusahaan, pajak merupakan pengurang laba bersih, dimana bertentangan dengan salah satu tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara mendapatkan laba bersih setinggi-

tingginya. Hal inilah yang memotivasi perusahaan untuk mengelola pajaknya agar lebih efisien dengan melakukan perencanaan pajak dengan maksud untuk mencari celah sehingga dapat membayar pajak seminimal mungkin.

Pengindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara yang digunakan untuk menekan jumlah beban pajak. Strategi perencanaan pajak ada yang bersifat legal dan ilegal. Strategi menekan beban pajak dapat dikatakan bersifat ilegal karena melanggar undang-undang dan aturan perpajakan sehingga tidak aman bagi wajib pajak disebut penyelundupan pajak atau *tax evasion* (Pohan, 2016) Kebalikan dari *tax evasion*, strategi perencanaan pajak yang legal adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah strategi menekan beban pajak yang bersifat legal karena tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga aman bagi wajib pajak (Pohan, 2016). Walaupun *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun tindakan ini tidak disukai oleh negara karena akan menurunkan pendapatan negara.

Contoh fenomena *tax avoidance* di Indonesia adalah kasus penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk, perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat berskala internasional, Global Witness yang bergerak dibidang isu lingkungan hidup, pada 4 Juli 2019 melaporkan bahwa terdapat dugaan PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak. Skema yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk untuk menghindari pajak adalah dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya, Coaltrade Services International, yang dilakukan selama tahun 2009 sampai 2017 (Melani & Tulus, 2019). Selain itu juga ada kasus lama yaitu oleh PT. Asian Agri yang

merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Modus penghindaran pajak PT. Asian Agri beraneka ragam, antara lain pembenahan biaya fiktif, *transfer pricing*, dan transaksi *hedging* atau lindung nilai, yang jumlahnya lebih dari Rp. 1 Triliun (Yusdi, 2019).

Berbagai penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Dari penelitian tersebut, disebutkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan hasil yang konsisten adalah *return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dikemukakan dalam penelitian Saputra, Rifa, & Rahmawati (2015), Oktagiani (2015), Irawan, Sularso, & Farida (2017), Arinda & Dwimulyani (2018), dan Masnawaty (2019). Karakteristik eksekutif juga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dikemukakan dalam penelitian Swingly & Sukartha (2015), Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), Meilia & Adnan (2017), dan Prastiwi & Ratnasari (2019). Selain itu, ditemukan juga bahwa intensitas aset tetap juga konsisten tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti yang dikemukakan oleh Jingga & Lina (2017), Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018), dan Riantami & Triyanto (2018).

Sementara itu, hasil yang belum konsisten adalah mengenai *corporate governance*, yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Wibawa, Wilopo, & Abdillah (2016), dan Eksandy (2017) mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sandy & Lukviarman (2015), Diantari & Ulupui (2016), dan Mulyani, Wijayanti,

& Masitoh (2018) mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), Riantami & Triyanto (2018), Mahanani, Titisari, & Nurlela (2017), Fadhila, Pratomo, & Yudowati (2017), Jamei (2017), dan Prasetyo & Pramuka (2018) mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional menurut Sandy & Lukviarman (2015), Tandean (2016), Diantari & Ulupui (2016), Irawan, Sularso, dan Farida (2017), dan Jamei (2017). tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, menurut Maraya & Yendrawati (2016) dan Prasetyo & Pramuka (2018) mengatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) dan Putri & Lawita (2019) mengatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam kepemilikan manajerial, menurut Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Jamei (2017) dan Prasetyo & Pramuka (2018) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Putri & Lawita (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Mengenai komite audit, menurut Swingly & Sukartha (2015), Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), dan Eksandy (2017) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), Tandean (2016), Diantari & Ulupui (2016), dan Fadhila, Pratomo, dan Yudowati

(2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016), Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017), dan Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Untuk kualitas audit, dalam penelitian Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) dan Winata (2014) mengemukakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016), Irawan, Sularso, dan Farida (2017), Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tetapi menurut Eksandy (2017) dan Arinda & Dwimulyani (2018) kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance*, terdapat faktor lain dengan hasil yang belum konsisten, yaitu pertumbuhan penjualan dan *leverage*. Untuk pertumbuhan penjualan, menurut Irawan, Sularso, dan Farida (2017), dan Arinda & Dwimulyani (2018) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Swingly & Sukartha (2015), Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017), dan Riantami & Triyanto (2018) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak juga dapat dilihat dari kebijakan pendanaannya, yaitu *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh Oktagiani (2015) dan Irawan, Sularso, dan Farida (2017) menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) dan Arinda & Dwimulyani (2018) menunjukkan bahwa *leverage*

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Jingga & Lina (2017) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adanya inkonsistensi pada hasil dari variabel-variabel tersebutlah yang mendorong penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*?
6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
5. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
6. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
7. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*” ini dapat dijadikan salah satu referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab I, menguraikan latar belakang masalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, juga membahas mengenai paparan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab II memaparkan teori yang menjadi landasan penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian setiap variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan populasi dan sampel yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan, serta metode yang digunakan untuk pengukuran setiap variabel, hipotesis penelitian dan pengujiannya.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil dari analisis data dengan menggunakan sampel penelitian yang telah diperoleh dan diolah, juga pembahasan terkait hipotesis penelitian.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab V ini memaparkan simpulan penelitian berdasarkan pembahasan hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan memuat saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara Indonesia yang terbesar. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Resmi (2017) dalam bukunya berjudul *Perpajakan* mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mengatakan, pajak adalah pemindahan kekayaan rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* untuk membiayai *public investment*.
2. S.I. Djajadiningrat mengatakan, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan atau perbuatan, tetapi bukan hukuman, dapat dipaksakan menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, namun tidak ada timbal balik secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.
3. Dr. N. J. Feldmann mengatakan, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Selain itu, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi oleh rakyat yang diberikan kepada negara menurut undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, sifatnya memaksa dan tidak ada timbal balik secara langsung dari negara kepada rakyat.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Dalam pengoptimalan penerimaan pajak, tentu terdapat kendala. Seperti adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Dimana dari segi pemerintah, pajak merupakan pendapatan dan dari segi perusahaan pajak merupakan pengurang laba. Karena itulah perusahaan termotivasi untuk mengefisiensikan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak mengingat beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perencanaan pajak ada yang bersifat legal yang dinamakan *tax avoidance* dan yang bersifat ilegal dinamakan *tax evasion*.

Perencanaan pajak yang bersifat legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah strategi menekan beban pajak yang bersifat legal karena tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga aman bagi wajib pajak (Pohan, 2016) Menurut Riantami & Triyanto (2018) mengatakan bahwa *tax*

avoidance adalah salah satu strategi pajak secara legal dengan menghindari pengenaan pajak dan mengarahkannya ke transaksi bukan objek pajak yang bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak. Irawan, Sularso, dan Farida (2017) juga mengatakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs*, yaitu suatu perbuatan legal meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* merupakan persoalan yang sedikit unik karena disisi diperbolehkan, namun disisi lain tidak diinginkan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment*, yakni sistem pemungutan yang mempersilahkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena fiskus tidak terlibat langsung dalam perhitungan kewajiban perpajakannya. Pengukuran *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan *Effective Tax Rate (ETR)*. Cara yang digunakan untuk menghitung ETR adalah dengan memperhitungkan perbandingan beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Perencanaan pajak selain bersifat legal, juga ada yang bersifat ilegal, yang disebut penyelundupan pajak (*tax evasion*). Pohan (2016) mengatakan *tax evasion* adalah strategi menekan beban pajak yang bersifat ilegal karena melanggar undang-undang dan aturan perpajakan. Perilaku *tax evasion* tidak aman dilakukan oleh wajib pajak karena beresiko tinggi dimana wajib pajak dapat dikenakan tindakan sanksi hukum dan tindak pidana fiskal atau kriminal. Menurut Mujiyati,

Rohmawati, & Ririn (2018) dalam *tax evasion* wajib pajak dapat mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, seperti memasukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap atau tidak benar.

2.1.3 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi (*agency theory*) sebagai hubungan keagenan di mana satu atau lebih pemilik perusahaan (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan kepada agen. *Principal* yang dimaksud adalah mereka yang berkepentingan, bisa kreditur maupun pemilik (investor). Sedangkan yang dimaksud *agent* adalah mereka yang ditunjuk dan dipercaya oleh *principal* untuk melaksanakan tugas yang diamanahi sehingga dapat tercapai tujuan dan sasarannya, yaitu manajemen.

Dalam teori agensi, dapat terjadi asimetris informasi karena agen dianggap memiliki pengetahuan lebih banyak daripada *principal*. Asimetris informasi dapat terjadi karena tidak memungkinkan bagi *principal* untuk mengawasi agennya secara terus-menerus sehingga agen memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kepentingan pribadinya dan mengabaikan tugasnya untuk memaksimalkan kekayaan *principal* (*agency conflict*). Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat *principal* dengan kendala, manfaat, dan insentif yang akan diterima oleh agen (Irawan, Sularso, & Farida, 2017).

Govindarajan & Anthony (2007) menjelaskan bahwa asimetri informasi akan menyebabkan agen salah dalam menyajikan informasi kepada principal. Asimetris informasi ini dapat mempengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah kebijakan perpajakan perusahaan. Manajemen yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai perusahaan karena menangani secara langsung perusahaan dapat membuat tindakan oportunistik yang lebih mementingkan pihaknya sendiri. Manajemen akan berusaha membuat laba perusahaan terlihat lebih besar, sehingga kinerja manajemen dianggap baik oleh pemegang saham maka kompensasi yang akan diterimapun semakin besar, namun disisi lain, pemegang saham tidak menginginkan pajak yang tinggi karena labanya yang juga semakin besar (Idzni & Purwanto, 2017).

2.1.4 *Trade-off Theory*

Dalam struktur finansial perusahaan, terdapat proporsi finansial berupa ekuitas dan utang, proporsi ini disebut dengan struktur modal (Husnan dalam Mutamimah & Rita, 2009) Keputusan perusahaan mengenai struktur modalnya dapat bersumber dari luar maupun dalam perusahaan. Dana dari internal perusahaan berasal dari laba ditahan sedangkan dana eksternal berasal dari kreditur dan investor.

Trade-off theory adalah salah satu teori mengenai struktur modal yang didasarkan pada pertukaran keuntungan dan kerugian karena penggunaan utang oleh perusahaan dengan biaya *financial distress* dan *agency cost* (Wikartika & Fitriyah, 2018) *Trade-off theory* pertamakali dikemukakan oleh Modigliani dan

Miller tahun 1958 yang dalam perkembangannya memasukkan unsur pajak sehingga struktur modal menjadi relevan karena bunga yang dibayarkan akibat adanya utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible*) (Mutamimah & Rita, 2009). Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penerapan *trade-off theory* adalah stabilitas penjualan, struktur aset, leverage, tingkat pertumbuhan, pajak, dan *management attitude* (Oktavina & Manalu, 2018).

Penggunaan utang sebagai salah satu sumber modal perusahaan memunculkan beban bunga, dimana beban bunga ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga laba sebelum pajak menjadi lebih kecil dan pajak terutangpun juga semakin kecil. Dalam teori ini perusahaan diperbolehkan untuk menggunakan utang sebagai salah satu sumber modalnya asalkan manfaat yang didapatkan dari penggunaan utang harus lebih besar daripada beban baik beban bunga, biaya kebangkrutan dan *agency cost*. *Trade-off theory* menyatakan struktur modal yang optimal dapat terjadi jika ada keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan yang muncul akibat adanya utang (Mutamimah & Rita, 2009).

2.1.5 *Corporate Governance*

Dalam *agency theory* terdapat asimetris informasi antara *principal* dan *agent*, hal ini disebabkan karena agen dianggap memiliki pengetahuan lebih banyak dan menyeluruh mengenai perusahaan, dimana hal ini menyebabkan agen salah dalam menyakinkan informasi ke *principal*. Maka dari itu, dibutuhkan *corporate governance* untuk menjembatani *agency problem*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hanum (dalam Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018) yang

mengemukakan bahwa pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan di perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan patuh terhadap peraturan.

Menurut Cadbury Report yang kemudian diikuti oleh OECD (*dalam* Lukviarman, 2016) mengatakan bahwa *corporate governance* adalah proses dimana perusahaan diarahkan (*directed*) dan dikendalikan (*controlled*). *Corporate governance* dapat menjadi pengawas dalam penghindaran pajak di perusahaan. Proksi yang digunakan adalah dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas auditor.

2.1.5.1 Dewan Komisaris Independen

Definisi komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik (Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015). Dalam peraturan Persyaratan Pencatatan Saham oleh Bursa Efek Indonesia dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 orang anggota, jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Fungsi utama dewan komisaris adalah meyakinkan bahwa korporasi telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan *appropriate manner* dengan melaksanakan fungsi *controlling* dan *monitoring* sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan (Lukviarman, 2016).

Menurut Riantami & Triyanto (2018) pengawasan terhadap kinerja manajemen semakin besar dan ketat seiring dengan besarnya jumlah anggota komisaris independen. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan

komisaris salah satunya adalah lebih berhati-hati dalam kebijakan dan praktik pengindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran variabel yang digunakan adalah persentase perbandingan anggota dewan komisaris independen dengan seluruh anggota dewan komisaris (Sandy & Lukviarman, 2015).

2.1.5.2 Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalkan *agency conflict* yang terjadi. Kepemilikan saham institusional adalah perbandingan saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu di atas lima persen, tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial (Sandy & Lukviarman, 2015).

Kepemilikan saham mewakili kekuasaan untuk mendukung atau tidak kebijakan manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka peningkatan pengawasan diharapkan lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Diantari & Ulupui, 2016). Chen *et al.* (dalam Tandean, 2016) mengatakan bahwa ada indikasi perusahaan non keluarga memiliki tingkat keagresifan terhadap penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan keluarga. Hal ini terjadi karena perusahaan keluarga lebih memikirkan reputasi dan nama baik perusahaan dimata masyarakat dibandingkan dengan perusahaan non keluarga yang cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Pengukuran variabel yang digunakan adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional terhadap total jumlah saham yang beredar.

2.1.5.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan diukur dari persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen tersebut (Prasetyo & Pramuka, 2018). Manajer memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengelola perusahaannya. Maka, dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen akan lebih giat dalam bekerja demi kepentingan perusahaan, karena jika perusahaan baik maka mereka akan baik juga, dan sebaliknya jika ada keputusan yang salah, maka mereka juga harus menanggung konsekuensinya. Manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, salah satunya keputusan mengenai penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, manajer akan merasakan langsung manfaat atau kerugian sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambilnya (Zahirah, 2017).

2.1.5.4 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan, untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, komite audit terdiri dari paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan dan komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Dalam *corporate governance*, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan perusahaan dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Tandean, 2016). Hal ini mengungkapkan bahwa tugas komite audit adalah sebagai jembatan antara perusahaan dan pemilik perusahaan. Maka, adanya komite audit dapat menekan perusahaan agar mematuhi undang-undang yang berlaku, seperti undang-undang perpajakan, sehingga dapat mengurangi kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya.

2.1.5.5 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah elemen penting yang merepresentasikan salah satu dari prinsip *corporate governance*, yaitu *transparency* (transparansi). Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan yang kemungkinan menemukan pelanggaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana dalam Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015).

Sebagai perusahaan *go public* tentunya lebih menuntut transparansi dengan pengungkapan yang akurat, salah satunya dibidang pajak. Menurut Sartori (dalam Sandy & Lukviarman, 2015) mengungkapkan bahwa pemegang saham tidak ingin perusahaannya terlalu agresif dalam hal pernghindaran pajak dan akan mencegah jika tahu sebelumnya sehingga transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

Pengukuran yang digunakan dilihat dari apakah laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4 atau tidak. KAP big 4 adalah kantor akuntan publik besar yang terkenal dan mendominasi secara internasional. KAP Big 4 tersebut adalah Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Yoiung, dan KPMG. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

2.1.6 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan investasi pada masa lampau dan dapat dijadikan ukuran peningkatan yang akan terjadi dimasa depan (Arinda & Dwimulyani, 2018). Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Deitiana *dalam* Sugiyarti, 2017). Menurut Oktamawati (*dalam* Riantami & Triyanto, 2018) mengatakan bahwa keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran suatu produk di perusahaan merupakan mencerminkan tingkat pertumbuhan penujualan yang tinggi.

2.1.7 Leverage

Leverage perusahaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir dalam Oktagiani, 2015). Menurut Arinda & Dwimulyani (2018) *leverage* digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan melunasi segala utang jangka panjang dan pendek perusahaan. Perusahaan banyak yang memilih metode pendanaannya menggunakan utang, karena adanya biaya bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelaahan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Simpulan
1.	Swingly & Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Independen:</u> Karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , <i>sales growth</i>	- Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

				<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	<u>Dependen: Tax avoidance</u> <u>Independen:</u> Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, <i>return on assets</i> , karakter eksekutif	- Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - <i>Return on assets</i> dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Sandy & Lukviarman (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur	<u>Dependen: Tax Avoidance</u> <u>Independen:</u> Komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional	- Komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4.	Oktagiani (2015)	Analisa Faktor-Faktor yang	<u>Dependen: Tax Avoidance</u>	- <i>Return on asset</i> dan ukuran perusahaan

		Mempengaruhi Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<u>Independen:</u> <i>Return on asset</i> , ukuran perusahaan, <i>loss fiscal carryforward</i>	- berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Loss fiscal carryforward</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governence</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Persentase dewan komisaris independen, komite audit, kualitas auditor eksternal.	- Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas auditor, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	Tandean (2016)	<i>Good Corporate Governence</i> dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada <i>Tax Avoidance</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Komite audit, kepemilikan institusional, independensi auditor, ukuran perusahaan	- Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh

				terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Diantari & Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan	- Komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional, tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
8.	Maraya & Yendrawati (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris pada Perusahaan	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Kualitas audit, kepemilikan institusional, CSR.	- Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

		Tambang dan CPO		
9.	Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Komisaris independen, kualitas audit, komite audit	- Komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
10.	Irawan, Sularso, & Farida (2017)	Analisis atas Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i> di Indonesia	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Ukuran perusahaan, <i>return on asset</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> , kepemilikan institusional, kualitas audit	- Ukuran perusahaan dan <i>return on asset</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

11.	Jamei (2017)	Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanism: Evidence from Tehran Stock Exchange	<u>Dependen:</u> Tax Avoidance <u>Independen:</u> Board members, proportion of non-duty members, institutional ownership	Board members, proportion of non-duty members, dan institutional ownership tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
12.	Jingga & Lina (2017)	Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange	<u>Dependen:</u> Tax Avoidance <u>Independen:</u> Firm characteristics, ROA, leverage	Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance Firm characteristics dan ROA tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
13.	Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance	<u>Dependen:</u> Tax Avoidance <u>Independen:</u> Umur perusahaan, komite audit, ukuran perusahaan, komisaris	Umur perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance Ukuran perusahaan, komisaris independen, sales growth, CSR tidak berpengaruh

			independen, <i>sales growth</i> , CSR	terhadap <i>tax avoidance</i>
14.	Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit	- Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
15.	Meilia & Adnan (2017)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan <i>Jakarta Islamic Index</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> <i>Financial distress</i> , karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif	- <i>Financial distress</i> , karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
16.	Riantami & Triyanto (2018)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen,	<u>Dependen:</u> <i>Tax avoidance</i>	- <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

		<i>Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance</i>	<u>Independen:</u> <i>Financial distress,</i> proporsi komisaris independen, intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan.	- Proporsi komisaris independen, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
17.	Prasetyo & Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen	- Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
18.	Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Kepemilikan institusional, komisaris	- Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

			independen, komite audit, dan kualitas audit	- Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
19.	Arinda & Dwimulyani (2018)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> Profitabilitas, <i>leverage, sales growth</i> , kualitas audit Moderasi: GCG	- Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Sales growth</i> , kualitas audit, dan GCG tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
20.	Riantami & Triyanto (2018)		<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> <i>Financial distress</i> , proporsi komisaris independen, intensitas aset	- <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi komisaris independen, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh

			tetap, pertumbuhan penjualan	terhadap <i>tax avoidance</i>
21.	Maulana, Marwa, dan Wahyudi (2018)	The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> <i>Transfer pricing, capital intensity, financial distress</i> Moderasi: <i>Firm Size</i>	- <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Firm Size</i> tidak memoderasi hubungan antara variable independen dan dependen.
22.	Masnawaty (2019)	Effect of Profitability and Size Companies on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed in	<u>Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Independen:</u> <i>Profitability, size companies</i>	- <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Size companies</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

		Indonesia Stock Exchange		
23.	Prastiwi & Ratnasari (2019)	The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015	<p><u>Dependen:</u> Tax Avoidance</p> <p><u>Independen:</u> Thin capitalization, executives' characteristics</p>	<p><i>Thin capitalization dan executives' characteristics</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
24.	Putri & Lawita, (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak	<p><u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Independen:</u> Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial</p>	<p>Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate governance dibutuhkan dalam perusahaan untuk mengurangi adanya asimetris informasi antara manajemen dan pemegang saham. Menurut Lukviarman (2016) dewan komisaris merupakan elemen *corporate governance* yang memiliki akuntabilitas kepada para pemegang kepentingan lainnya. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi manajemen agar tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan. dalam Persyaratan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia, jumlah komisaris independen minimal 30% dari total seluruh anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik (Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015). Semakin banyak perusahaan mempunyai anggota komisaris independen maka semakin tinggi tingkat independensinya dan semakin rendah tingkat praktik *tax avoidance*. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit perusahaan mempunyai anggota komisaris independen maka semakin rendah tingkat independensinya dan semakin tinggi tingkat praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat. Manajemen akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan karena adanya pengawasan yang semakin ketat, sehingga terciptanya transparansi dalam menjalankan manajemen perusahaan dan dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* (Diantari & Ulupui,

2016). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) yang mengatakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan tidak hanya menjadi simbol saja, dewan komisaris diharapkan dapat menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Sandy & Lukviarman (2015) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian oleh Diantari & Ulupui (2016) dan Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan proporsi komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti komisaris independen efektif mencegah praktik *tax avoidance*.

H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pada setiap perusahaan, perlu adanya pihak yang mengawasi dari luar untuk menghindari adanya konflik-konflik dari berbagai pihak karena adanya kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu di atas lima persen, tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial (Sandy & Lukviarman, 2015). Menurut Tarjo (*dalam* Winata, 2014)

konsentrasi kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain).

Menurut Diantari & Ulupui (2016) dalam kepemilikan institusional, kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan terhadap manajemen untuk mendukung atau tidak, maka dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka peningkatan pengawasan diharapkan lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional lebih besar, maka kinerja manajemennya akan semakin diawasi karena adanya pengawasan oleh institusi tersebut agar mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah karena juga memikirkan reputasi dan nama baik perusahaan di masyarakat, Sehingga, diharapkan dengan pengawasan yang tinggi mampu menghindari dari praktik penghidaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo & Pramuka (2018) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi persentase kepemilikan saham institusional, maka semakin rendah tingkat praktik *tax avoidance*. Penelitian oleh Maraya & Yendrawati (2016) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan diukur dari persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen tersebut Prasetyo & Pramuka (2018). Dengan adanya kepemilikan manajerial, tentu manajer akan berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik saham karena posisi yang sejajar, sehingga manajer akan bertindak sejalan dengan kepentingan pemilik saham dengan meningkatkan kinerja dan memaksimalkan kemakmuran pemilik saham.

Manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, salah satunya keputusan mengenai penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dalam kepemilikan manajerial, manajer akan merasakan langsung manfaat atau kerugian sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambilnya (Zahirah, 2017). Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika kepemilikan manajerial atas saham diperusahaan semakin besar, maka semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan, untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance*. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, minimal terdapat 3 anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten. Pohan (*dalam* Swingly & Sukartha, 2015) menemukan bahwa jika jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Fungsi komite audit adalah bertanggungjawab untuk memastikan perusahaan dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Tandean, 2016). Komite audit bertugas mengontrol proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan oleh pihak manajemen (Eksandy, 2017). Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada sebuah manajemen perusahaan, semakin berkualitas dan efektif informasi yang disampaikan, sehingga dapat mengurangi penyimpangan informasi dalam laporan keuangan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015), Diantari & Ulupui (2016), Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin banyak anggota komite audit maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang terjadi. Penelitian serupa oleh Tandean (2016) juga mengemukakan semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat sehingga sulit untuk dilakukannya *tax avoidance*.

H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan yang kemungkinan menemukan pelanggaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Maharani dan Suardana dalam Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015) Kualitas audit merupakan salah satu bentuk dari aspek penting *corporate governance* yaitu transparansi.

Syarat dari transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Maraya & Yendrawati, 2016). Menurut Sartori (dalam Sandy & Lukviarman, 2015) mengungkapkan bahwa pemegang saham tidak ingin perusahaannya terlalu agresif dalam hal pernghindaran pajak dan akan mencegah jika tahu sebelumnya sehingga transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor sehingga investor akan lebih percaya pada informasi tersebut. Menurut Annisa dan Kurniasih (*dalam Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015*) apabila suatu perusahaan diaudit oleh KAP The BigFour (Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) akan sulit melakukan kebijakan pajak. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four, kualitas auditnya berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti kualitas audit tinggi dan semakin baik, maka praktik penghindaran pajak yang agresif semakin menurun. Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016), Maraya & Yendrawati (2016), Irawan, Sularso, dan Farida (2017), Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang semakin baik, maka praktik penghindran pajak semakin menurun.

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.6 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Arinda & Dwimulyani (2018) pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan investasi pada masa lampau dan dapat dijadikan ukuran peningkatan yang akan terjadi dimasa depan. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, laba yang didapatkan juga akan meningkatkan penghasilan kena pajak, sehingga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* semakin tinggi karena perusahaan pasti mengharapkan laba yang besar dari kegiatan operasionalnya.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Sularso, dan Farida (2017) dan Arinda & Dwimulyani (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan penjualan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang terjadi.

H6: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.7 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Pendanaan perusahaan ada yang berasal dari internal dan eksternal. *Leverage* merupakan salah satu pendanaan perusahaan yang berasal dari eksternal. *Leverage* perusahaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir dalam Oktagiani, 2015). Ketika kebijakan pendanaan perusahaan berasal dari utang, maka diharuskan membayar beban bunga. Dengan adanya beban bunga, laba bersih perusahaan akan berkurang dan beban pajakpun juga sedikit sehingga perusahaan tidak perlu menekan beban

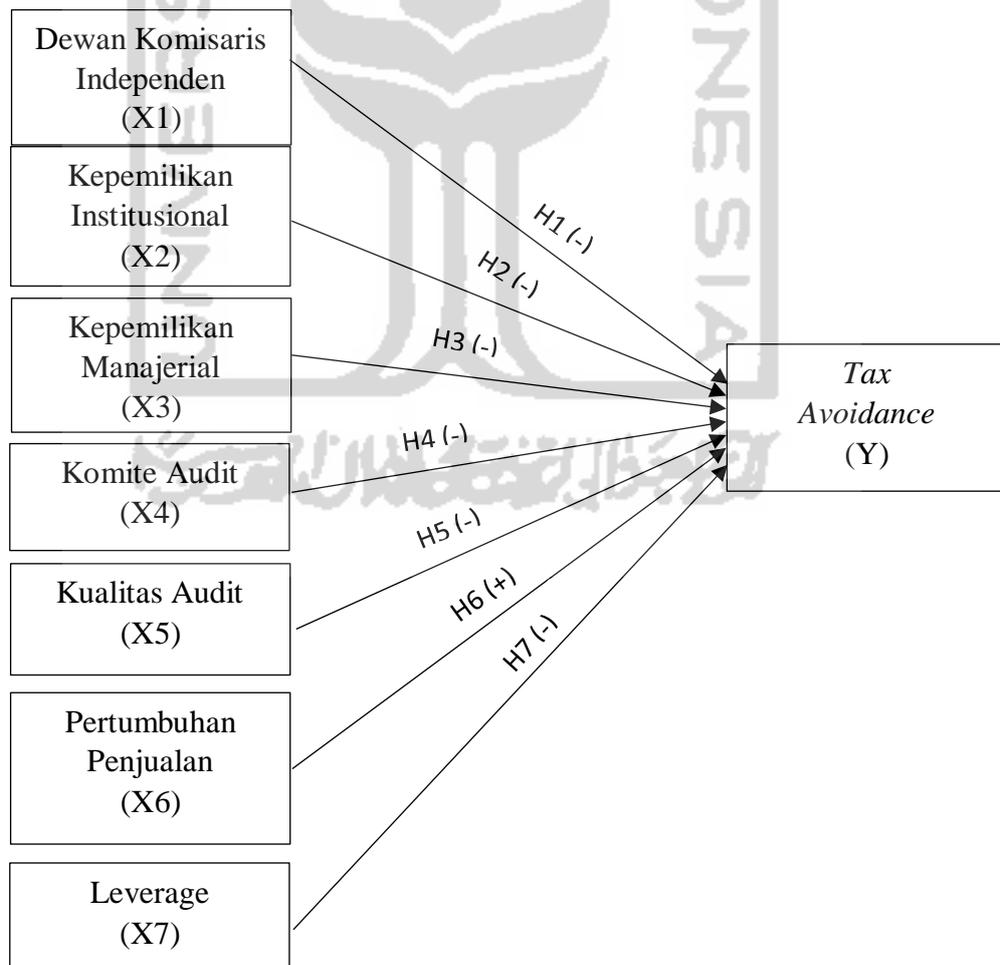
pajaknya lagi. Maka, semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka kemungkinan melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) dan Arinda & Dwimulyani (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah juga praktik *tax avoidance* yang terjadi.

H7: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 1 Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang memberikan informasi resminya baik di www.idx.co.id ataupun web resmi masing-masing perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

3.2 Sampel dan Metode Pemilihan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang bertujuan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2017).

Beberapa kriteria sampel yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Perusahaan mengungkapkan laporan keuangan tahunan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) selama periode 2014-2018 secara berturut-turut.
3. Perusahaan tidak mengalami rugi selama periode tahun 2014-2018.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan web resmi perusahaan.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1 *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah strategi menekan beban pajak yang bersifat legal karena tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga aman bagi wajib pajak (Pohan, 2016).

Pengukuran *tax avoidance* diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menggambarkan total beban pajak yang harus dibayarkan dari total laba sebelum pajak. Semakin tinggi tingkat persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Dewinta dan Putu dalam Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Pengukuran ini juga digunakan oleh Sandy & Lukviarman (2015), Pramudito & Sari (2015), Diantari & Ulupui (2016), Irawan, Sularso, & Farida (2017), Prasetyo & Pramuka (2018).

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.4.2 Dewan Komisaris Independen

Definisi komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik (Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015)

Pengukuran proporsi dewan komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Pengukuran ini juga digunakan dalam penelitian milik Sandy & Lukviarman (2015) dan Diantari & Ulupui (2016).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Anggota dewan komisaris independen}}{\text{Seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.4.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu diatas lima persen, tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial (Sandy & Lukviarman, 2015). Dilihat dari tingkat kepemilikannya, semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar akan pengawasan terhadap pihak manajemen. Kepemilikan saham mewakili kekuasaan untuk mendukung atau tidak kebijakan manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka peningkatan pengawasan diharapkan lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Diantari & Ulupui, 2016).

Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan total kepemilikan saham beredar oleh institusi dibandingkan dengan total seluruh saham beredar. Pengukuran ini digunakan pula oleh penelitian Prasetyo & Pramuka (2018).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh pihak institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.4.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan diukur dari perbandingan saham biasa yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham beredar (Prasetyo & Pramuka, 2018). Dengan kata lain, manajer akan semakin aktif dalam meningkatkan nilai dan citra perusahaan.

Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh manajemen dengan total saham yang beredar. Pengukuran ini digunakan juga dalam penelitian oleh (Fadhila, Pratomo, dan Yudowati, 2017) dan Prasetyo & Pramuka (2018).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.4.5 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan, untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam

pengelolaan perusahaan (Winata, 2014). Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, maka proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dikontrol juga oleh komite audit (Eksandy, 2017).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Pengukuran ini digunakan juga dalam penelitian Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017), Sandy & Lukviarman (2015), dan Tandean (2016).

Komite Audit = Jumlah anggota komite audit

3.4.6 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan yang kemungkinan menemukan pelanggaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana dalam Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2015). Kualitas audit merupakan salah satu bentuk dari aspek penting *corporate governance* yaitu transparansi.

Kualitas audit diukur berdasarkan KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four (Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young (E&Y)) diberi nilai 1 dan yang diaudit oleh KAP selain Big Four diberi nilai 0. Pengukuran menggunakan dummy ini seperti yang dilakukan dalam penelitian Sandy & Lukviarman (2015) dan Maraya & Yendrawati (2016).

3.4.7 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Arinda & Dwimulyani (2018), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah rasio mengukur pertumbuhan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya yang menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan investasi di masa lalu dan dapat dijadikan tolak ukur peningkatan yang akan terjadi dimasa depan.

Pertumbuhan penjualan diukur dengan selisih penjualan tahun ke i dan tahun sebelumnya dibanding dengan penjualan tahun sebelumnya. Pengukuran ini juga digunakan dalam penelitian milik Riantami & Triyanto (2018) dan Arinda & Dwimulyani (2018).

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun ke } t - \text{Penjualan tahun } t - 1}{\text{Penjualan tahun } t - 1}$$

3.4.8 Leverage

Leverage perusahaan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan di biyai dengan utang (Kasmir dalam Oktagiani, 2015). Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Sama dengan penelitian oleh Oktagiani (2015) dan Arinda & Dwimulyani (2018), indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah indikator Debt To Equity Ratio, yaitu:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2007) berpendapat bahwa analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran data, yang dapat dinilai dari *mean*, standar deviasi, varian, nilai maksimal, nilai minimal, *sum*, *range*, *kurtosis* atau *skewness*. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah modal regresi yang digunakan residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2007). Untuk menghasilkan data yang relevan agar dapat dilakukan uji t dan uji F, maka data yang digunakan harus terdistribusi normal. Kriteria uji Kolmogorov-Smirnov yang dijadikan pedoman dalam uji normalitas adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($< 5\%$) maka data terdistribusi tidak normal, dan sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ($> 5\%$) maka disimpulkan data terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 2007). Variabel yang baik adalah yang tidak memiliki korelasi sehingga variabel bersifat ortogonal. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas yaitu memiliki *tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2007) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linier berganda yang digunakan terdapat korelasi antara residual berdasarkan urutan waktu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan melalui Run Test. Dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, begitu pula sebaliknya.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2007). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2007). Jika nilai probabilitas signifikansi variabelnya $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi Liner Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan :

$Y = Tax Avoidance$

$a =$ Nilai konstanta (harga Y bila $X=0$)

$b_1,2,3,4,5,6,7 =$ Nilai koefisien regresi

$X_1 =$ Variabel dewan komisaris

$X_2 =$ Variabel kepemilikan institusional

$X_3 =$ Variabel kepemilikan manajerial

$X_4 =$ Variabel komite audit

$X_5 =$ Variabel kualitas audit

$X_6 =$ Variabel pertumbuhan penjualan

$X_7 =$ Variabel *leverage*

$e = standard error$

3.5.4 Uji F/Uji Kelayakan Model

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model apakah data empiris sesuai dengan model regresinya. Jika nilai signifikan < 0.05 maka model penelitian yang diestimasi layak digunakan dan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka model penelitian yang diestimasi tidak layak digunakan.

3.5.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang semakin besar atau semakin mendekati satu menunjukkan hasil regresi yang semakin baik. Hal ini berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3.5.6 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji t dapat dihitung dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan tabel. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a didukung dan H_o tidak didukung, dengan kata lain bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitu pula sebaliknya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah anggota komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data yang didapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan periode 2014-2018 yang mengungkapkannya baik di situs BEI, ataupun di situs resmi masing-masing perusahaan. Kriteria pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	49
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak <i>listing</i> pada periode 2014-2018 secara berturut-turut.	(7)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian sebelum pajak selama 2014-2018.	(25)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki data-data yang diperlukan untuk penelitian.	(1)
5.	Jumlah sampel perusahaan	16
Jumlah pengamatan (16 perusahaan x 5 tahun)		80

Sumber: Data sekunder, 2020

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskripsi dari variabel kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Kualitas Audit

Kualitas Audit	Perusahaan Pertambangan	
	f	%
KAP Big Four	10	62.5
KAP Non Big Four	6	37.5

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 16 observasi perusahaan di sektor pertambangan, sebanyak 10 observasi perusahaan (62.5%) diaudit oleh KAP Big Four, sedangkan yang diaudit oleh KAP Non Big Four sebanyak 6 perusahaan (37.5%).

Statistik deskriptif dari variabel *tax avoidance*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	80	.07	.58	.3035	.10030
KIND	80	.20	.67	.3806	.09469
KINST	80	.260000	.970000	.67210433	.189717090
KMNJ	80	.000000	.651086	.02807768	.084945425
KOA	80	2	5	3.14	.522
SG	80	-.91	3.39	.0960	.45529
LV	80	.17	3.56	.8223	.62673
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Dari tabel 4.3, hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 0.07 yang diperoleh dari perusahaan Atlas Resources Tbk. (ARTI) tahun 2015 dan 2016 menunjukkan Atlas Resources Tbk. memiliki tingkat beban pajak paling rendah dibanding yang lainnya atau dengan kata lain memiliki tingkat penghindaran pajak paling tinggi. Variabel ETR dengan nilai maksimumnya adalah 0.58 yang diperoleh dari Resource Alam Indonesia Tbk. (KKG I) tahun 2018 ini menunjukkan Radiant Utama Interinsco Tbk. memiliki tingkat beban pajak paling tinggi atau tingkat penghindaran pajaknya terendah dibanding yang lain. Nilai rata-rata (*mean*) dari 80 data ETR adalah 0.3035 dan memiliki standar deviasi sebesar 0.10030. Nilai rata-rata ETR lebih besar daripada standar deviasinya yang berarti data penghindaran pajak tersebut bersifat homogen.
- b. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel independen proporsi dewan komisaris independen (KIND) adalah sebesar 0.20 yang diperoleh dari data Timah Tbk. (TINS) tahun 2014, 2017, dan 2018 yang berarti memiliki proporsi dewan komisaris independen paling sedikit yaitu 1 dari total 5 anggota. Kemudian nilai maksimumnya adalah 0.67 yang diperoleh dari Toba Bara Sejahtera Tbk. (TOBA) tahun 2014, 2015, dan 2016 yang menunjukkan Toba Bara Sejahtera Tbk. memiliki proporsi anggota dewan komisaris independen paling banyak yaitu 2 komisaris independen dari 3 anggota. Rata-rata dari 80 data proporsi dewan komisaris independen adalah 0.3806 dengan standar deviasi yang lebih kecil adalah 0.09469 menunjukkan data bersifat homogen.

- c. Kepemilikan institusional (KINST) memiliki nilai minimum 0.26 yang diperoleh dari data Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) tahun 2014 dan 2015 menunjukkan kepemilikan saham oleh pihak institusional Baramulti Suksessarana Tbk lebih rendah daripada yang lain. Untuk nilai maksimum memiliki nilai sebesar 0.97 didapat dari perusahaan Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan kepemilikan oleh pihak institusional terbesar dibanding data lain. Rata-rata yang dimiliki oleh variabel kepemilikan institusional sebesar 0.6721043 lebih besar dibanding standar deviasinya 0.18971709 yang menunjukkan data bersifat homogen.
- d. Kepemilikan manajerial (KMNJ) memiliki nilai minimum sebesar 0.00 yang diperoleh dari beberapa perusahaan, yaitu Darma Henwa Tbk. (DEWA) tahun 2014-2018, Elnusa Tbk. (ELSA) tahun 2014, 2015, dan 2018, Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) tahun 2014-2018, Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP) tahun 2014 dan 2015, Samindo Resources Tbk. (MYOH) tahun 2014-2018, Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2014-2018, dan Toba Bara Sejahtera Tbk. (TOBA) tahun 2018, yang berarti tidak ada kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Untuk nilai maksimum yang dimiliki oleh variabel kepemilikan manajerial adalah 0.65109 yang didapat dari data perusahaan Baramulti Susksessarana Tbk. (BSSR) tahun 2014, yang berarti memiliki kepemilikan saham oleh pihak manajemen terbesar dibanding lainnya. Kepemilikan manajerial memiliki nilai *mean* sebesar 0.028077 dan standar deviasi sebesar 0.08496 yang berarti bersifat heterogen.

- e. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel komite audit (KOA) adalah 2 yang didapat dari data Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI) tahun 2014-2017 dan Baramulti Susksessarana Tbk. (BSSR) tahun 2014, yang berarti memiliki anggota komite audit 2. Memiliki nilai maksimum 5 yang diperoleh dari Timah Tbk. (TINS) tahun 2015, yang berarti memiliki anggota komite audit paling banyak, yaitu 5. Komite audit juga memiliki data yang homogen karena nilai *mean* lebih besar daripada standar deviasi, yaitu 3.14 dan 0.522.
- f. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel pertumbuhan penjualan (SG) adalah -0.91, diperoleh dari data perusahaan Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2015 yang memiliki penurunan penjualan terbanyak. Nilai maksimumnya adalah 3.39, didapatkan dari data perusahaan Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) tahun 2018 yang berarti memiliki peningkatan penjualan paling besar dari yang lainnya. *Mean* yang dimiliki variabel pertumbuhan penjualan adalah 0.0960 dan standar deviasinya 0.45529 yang berarti bersifat heterogen.
- g. Variabel *leverage* (LV) memiliki nilai minimum 0.17 yang didapatkan dari data perusahaan Resource Alam Indonesia Tbk. (KKGI) tahun 2016, ini menunjukkan perusahaan tersebut memiliki metode pendanaan dengan utang terkecil dibanding yang lain. Nilai maksimumnya adalah 3.56 yang diperoleh Citatah Tbk. (CTTH) tahun 2014, ini menunjukkan perusahaan tersebut memiliki metode pendanaan dengan utang terbesar dibanding yang lain. Variabel *leverage* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.8223 dan standar deviasi 0.62673. Nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasinya menunjukkan data bersifat homogen.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08321163
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.931
Asymp. Sig. (2-tailed)		.352

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2007). Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji distribusi normalitas data. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4 yang menunjukkan nilai kolmogorov smirnov Z menunjukkan nilai 0.931 dan probabilitas dari Unstandardized Residual adalah 0.352. Dikatakan normal apabila probabilitas adalah diatas 5% atau 0.05. Karena $0.352 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.036	.119		-.303	.763		
1							
KIND	.048	.120	.046	.403	.688	.749	1.335
KINST	.040	.066	.076	.612	.542	.620	1.612
KMNJ	.629	.143	.532	4.408	.000	.656	1.525
KOA	.079	.025	.409	3.200	.002	.584	1.711
KUA	.029	.026	.141	1.118	.267	.600	1.666
SG	-.042	.023	-.189	-1.784	.079	.854	1.170
LV	.028	.016	.172	1.703	.093	.932	1.073

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2007). Dalam model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dikatakan tidak ada korelasi antara variabel independen dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolonieritas yaitu memiliki *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10. Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji multikolinieritas dimana nilai *tolerance value* semua variabel memiliki nilai lebih dari 0.10 dan memiliki VIF kurang dari 10, ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak ada multikolinieritas.

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2007) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu berdasarkan urutan waktu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Run Test. Hasil Run Test adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00794
Cases < Test Value	40
Cases \geq Test Value	40
Total Cases	80
Number of Runs	33
Z	-1.800
Asymp. Sig. (2-tailed)	.072

a. Median

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.072 dimana lebih besar dari 0.05. Karena nilai probabilitas $0.072 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa residual bersifat random atau tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi perbedaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2007). Penelitian ini menggunakan uji Glejser. Uji Glejser yaitu meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2007). Jika nilai probabilitas signifikansi variabelnya $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.038	.072		-.533	.596
	KIND	.120	.073	.206	1.659	.101
	KINST	-.025	.040	-.087	-.634	.528
	KMNJ	.118	.087	.182	1.366	.176
	KOA	.016	.015	.155	1.101	.275
	KUA	.031	.016	.275	1.980	.051
	SG	-.020	.014	-.164	-1.413	.162
	LV	.008	.010	.093	.836	.406

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Dari tabel 4.7 tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel menunjukkan hasil probabilitas signifikansi lebih dari 0.05 yang berarti tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 8 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B (Koefisien Regresi)	t Hitung	Sig. t
(Constant)	-0.036	-0.303	.763
Komisaris Independen (KIND)	0.048	0.403	0.688
Kepemilikan Institusional (KINST)	0.040	0.612	0.542
Kepemilikan Manajerial (KMNJ)	0.629	4.408	0.000
Komite Audit (KOA)	0.079	3.200	0.002
Kualitas Audit (KUA)	0.029	1.118	0.267
Pertumbuhan Penjualan (SG)	-0.042	-1.784	0.079
Leverage (LV)	0.028	1.703	0.093

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis regresi linear berganda didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance} = -0.036 + 0.048\text{KI} + 0.040\text{KINST} + 0.629\text{KMNJ} + 0.079\text{KOA} + 0.029\text{KUA} - 0.042\text{SG} + 0.028\text{LV} + e$$

4.4.1 Hasil Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model apakah data empiris sesuai dengan model regresinya. Jika nilai probabilitas signifikan < 0.05 maka model penelitian layak digunakan dan jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka model penelitian tidak layak digunakan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.248	7	.035	4.660	.000 ^b
	Residual	.547	72	.008		
	Total	.795	79			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), LV, KIND, KUA, KMNJ, SG, KINST, KOA

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji F dengan signifikansi sebesar 0.000 dengan tingkat signifikansi < 0.05 . Karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak digunakan.

4.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2007). Hasil uji koefisien determinasi variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.312	.245	.08716

a. Predictors: (Constant), LV, KIND, KUA, KMNJ, SG, KINST, KOA

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa hasil R^2 menunjukkan nilai sebesar 0.312 yang berarti variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *leverage* hanya sebesar 0.312 atau 31,2%, sedangkan sisanya yaitu 68,8% dijelaskan oleh faktor lain selain model tersebut.

4.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4. 11 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	B	t hitung	Sig. t	Hasil
H1	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.048	0.403	0.688	Tidak didukung
H2	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.040	0.612	0.542	Tidak didukung
H3	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.629	4.408	0.000	Tidak didukung
H4	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.079	3.200	0.002	Tidak didukung
H5	Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.029	1.118	0.267	Tidak didukung
H6	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	-0.042	-1.784	0.079	Tidak didukung
H7	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0.028	1.703	0.093	Tidak didukung

Sumber: Output yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 21, (2020)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Jika nilai sig. $T < 0,05$, maka H_0 tidak didukung dan H_a didukung, dengan kata lain bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.11 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Variabel Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi 0.048, t hitung sebesar 0.403, dan sig. t 0.688 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_1 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis pertama yang menyatakan "H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

b. Variabel Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi 0.040, t hitung sebesar 0.612, dan sig. t 0.542 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_2 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis kedua yang menyatakan "H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

c. Variabel Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi 0.629, t hitung sebesar 4.408, dan sig. t sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_3 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis ketiga yang menyatakan "H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

d. Variabel Komite Audit

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi 0.079, t hitung sebesar 3.2 dan sig. t 0.002 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya komite audit secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_4 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis keempat yang menyatakan "H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

e. Variabel Kualitas Audit

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi 0.029, t hitung sebesar 1.118 dan sig. t 0.267 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_5 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis kelima yang menyatakan "H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

f. Variabel Pertumbuhan Penjualan

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi -0.042 , t hitung sebesar -1.784 dan sig. t 0.079 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya pertumbuhan penjualan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_6 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis keenam yang menyatakan "H6: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

g. Variabel *Leverage*

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien regresi 0.028 , t hitung sebesar 1.703 dan sig. t 0.093 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti H_0 didukung dan H_7 tidak didukung atau dengan kata lain hipotesis ketujuh yang menyatakan "H7: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*" tidak didukung.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian antara variabel dewan komisaris independen dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum 0.20 (memiliki 1 komisaris independen dari total 5 anggota) dan nilai maksimumnya adalah 0.67 yang diperoleh dari Toba Bara Sejahtera Tbk. (TOBA) tahun 2014, 2015, dan 2016 (memiliki 2 komisaris independen dari total 3 anggota). Tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.048 dan probabilitas 0.688 . Karena

0.688 > 0.05 maka dapat disimpulkan H1 tidak didukung, berarti tidak terjadi pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Artinya perusahaan yang memiliki proporsi anggota komisaris independen banyak maupun sedikit tidak berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan mengenai penghindaran pajak.

Tidak adanya pengaruh kemungkinan dapat disebabkan karena walaupun jumlah anggota yang banyak, namun kembali lagi pada kinerja masing-masing anggota. Anggota dewan komisaris bisa jadi tidak menjalankan fungsi *controlling* dan *monitoring* dengan baik sehingga tidak dapat mempengaruhi tindakan manajemen dalam mengambil keputusan mengenai *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017) yang mengatakan dewan komisaris tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan mengenai pajak. Dugaan lain menurut Prasetyo & Pramuka (2018) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena anggota komisaris independen adalah orang diluar perusahaan, sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan tindakan manajemen, bahkan lebih memilih manajemen untuk mengungkapkan informasinya lebih luas lagi.

Hasil penelitian menunjukkan H1 tidak dukung yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), Riantami & Triyanto (2018), Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017), Fadhila, Pratomo dan Yudowati (2017), Jamei (2017), dan Prasetyo & Pramuka (2018).

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai nilai minimum 0.26 yang diperoleh dari data Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) tahun 2014 dan 2015 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0.97 didapat dari perusahaan Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) tahun 2014 sampai 2018.

Berdasarkan tabel 4.11, memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.040 dan probabilitas 0.542. Karena $0.542 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H2 tidak didukung, yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, besar kecil kepemilikan saham oleh pihak institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* kemungkinan disebabkan karena pihak institusional kurang memaksimalkan pengawasan untuk memantau atau mempengaruhi tindakan manajemen. Dugaan lain terkait hal ini, menurut Tandean (2016) mengemukakan bahwa pemilik institusional lebih mementingkan laba yang akan mereka peroleh, sehingga banyak sedikitnya kepemilikan saham oleh pihak institusi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan H2 tidak dukung yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Sandy & Lukviarman (2015), Tandean (2016), Irawan, Sularso, dan Farida (2017), dan Jamei (2017) yang mengatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian antara variabel kepemilikan manajerial dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.00 yang diperoleh dari beberapa perusahaan, yaitu Darma Henwa Tbk. (DEWA) tahun 2014-2018, Elnusa Tbk. (ELSA) tahun 2014, 2015, dan 2018, Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) tahun 2014-2018, Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP) tahun 2014 dan 2015, Samindo Resources Tbk. (MYOH) tahun 2014-2018, Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2014-2018, dan Toba Bara Sejahtera Tbk. (TOBA) tahun 2018, yang berarti tidak ada kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan dan nilai maksimum yang dimiliki oleh variabel kepemilikan manajerial adalah 0.65109 yang didapat dari data perusahaan Baramulti Susksessarana Tbk. (BSSR) tahun 2014 yang memiliki kepemilikan saham oleh pihak manajemen paling besar dibanding yang lain.

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.629 dan probabilitas 0.000. Karena $0.000 < 0.05$ berarti kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan hal ini tidak mendukung H3. Kepemilikan manajerial dapat berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* kemungkinan dapat disebabkan karena pihak manajemen juga mementingkan laba yang mereka peroleh. Laba yang tinggi akan menyebabkan dividen yang diberikan juga semakin besar. Karena manajemen juga sebagai pemegang saham, maka manajemen juga merasakan kenaikan jumlah dividen.

H3 tidak didukung karena hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka semakin agresif juga perusahaan dalam menghindari pajak, yang berarti juga semakin kecil nilai ETR. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Putri & Lawita (2019).

4.5.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian antara variabel komite audit dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar 2 (memiliki jumlah anggota 2) yang diperoleh dari data Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI) tahun 2014-2017 dan Baramulti Susksessarana Tbk. (BSSR) tahun 2014, nilai maksimum 5 (memiliki jumlah anggota 5) yang diperoleh dari Timah Tbk. (TINS) tahun 2015.

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.079 dan probabilitas 0.002. Karena $0.002 > 0.05$ maka dapat disimpulkan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan tidak mendukung H4. Artinya, semakin banyak jumlah komite audit praktik penghindaran pajak semakin tinggi pula. Komite audit dapat berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* kemungkinan dapat disebabkan karena menurut Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) pemilihan struktur anggota komite audit dilakukan oleh dewan komisaris, apabila ada dewan komisaris yang menyalahgunakan wewenangnya, hal ini akan menjadikan semakin banyaknya anggota komite audit akan semakin meningkatkan praktik penghindaran pajak karena komite audit merupakan salah satu yang dapat menghubungkan pelaporan antara pihak manajemen dan pemilik.

H4 tidak didukung karena penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin banyak anggota komite audit, maka semakin agresif juga perusahaan dalam menghindari pajak, yang berarti juga semakin kecil nilai ETR. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Wibawa, Wilopo, Abdillah (2016), Mahanani, Titisari, dan Nurlarla (2017), Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) yang mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

4.5.5 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa 10 perusahaan sektor pertambangan (62,5%) diaudit oleh KAP Big 4 dan 6 perusahaan (37,5%) diaudit oleh KAP Non Big 4. Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian antara variabel kualitas audit dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.029 dan probabilitas 0.267. Karena $0.267 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H5 tidak didukung, yang berarti kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang diaudit baik oleh KAP Big Four maupun KAP Non Big Four tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tidak adanya pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* kemungkinan dapat disebabkan karena setiap KAP dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti standar yang berlaku. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Winata (2014) yang mengatakan KAP mengaudit laporan keuangan berpedoman kepada standar yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) dan etika yang ditetapkan oleh IAPI. Hasil penelitian menunjukkan H5 tidak didukung yang berarti tidak ada

pengaruh signifikan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015) yang mengatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.6 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian antara variabel pertumbuhan penjualan dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum -0.91, diperoleh dari data perusahaan Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) tahun 2015 yang memiliki penurunan penjualan terbanyak dan nilai maksimum adalah 3.39, didapatkan dari data perusahaan Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) tahun 2018.

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.042 dan probabilitas 0.079. Karena $0.079 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_6 tidak didukung, yang berarti pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, adanya penurunan maupun kenaikan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh *avoidance* kemungkinan dapat disebabkan karena penjualan merupakan target dari manajemen penjualan, sedangkan *tax avoidance* merupakan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen puncak, sehingga pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kebijakan mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen puncak.

Hasil penelitian yang menunjukkan H_6 tidak didukung yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Irawan, Sularso, dan Farida (2017) dan Arinda & Dwimulyani (2018) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.5.7 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.3, hasil pengujian antara variabel *leverage* dengan variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum 0.17 yang didapatkan dari data perusahaan Resource Alam Indonesia Tbk. (KKGI) tahun 2016 dan nilai maksimumnya adalah 3.56 yang diperoleh Citatah Tbk. (CTTH) tahun 2014.

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.028 dan probabilitas 0.093. Karena $0.093 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H7 tidak didukung, yang berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* kemungkinan dapat disebabkan karena berdasarkan tabel 4.3, nilai rata-rata *leverage* adalah 0.8223, sedangkan menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, nilai DER tertinggi yang dibolehkan adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat *leverage* perusahaan sampel tergolong rendah, yang artinya struktur modal perusahaan tidak terlalu banyak yang berasal dari utang, sehingga utang yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penggunaan utang yang besar juga sangat beresiko dimasa yang akan datang, sehingga manajemen akan berhati-hati dalam memilih penggunaan utang yang tinggi sebagai salah satu cara untuk menghindari pajaknya.

Hasil penelitian yang menunjukkan H7 tidak didukung yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Oktagiani (2015) dan Irawan, Sularso, dan Farida (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya banyak sedikitnya jumlah komisaris independen tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya banyak sedikitnya kepemilikan saham oleh pihak institusi tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin banyak kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka perilaku penghindaran pajak juga semakin tinggi.
4. Komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin banyak anggota komite audit maka perilaku penghindaran pajak juga semakin tinggi.
5. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya baik perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP Big Four maupun yang diaudit oleh KAP Non Big Four tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.

6. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya peningkatan atau penurunan penjualan oleh perusahaan tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.
7. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya baik perusahaan yang memilih struktur pendanaannya lebih banyak dari utang ataupun yang tidak, keduanya tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.

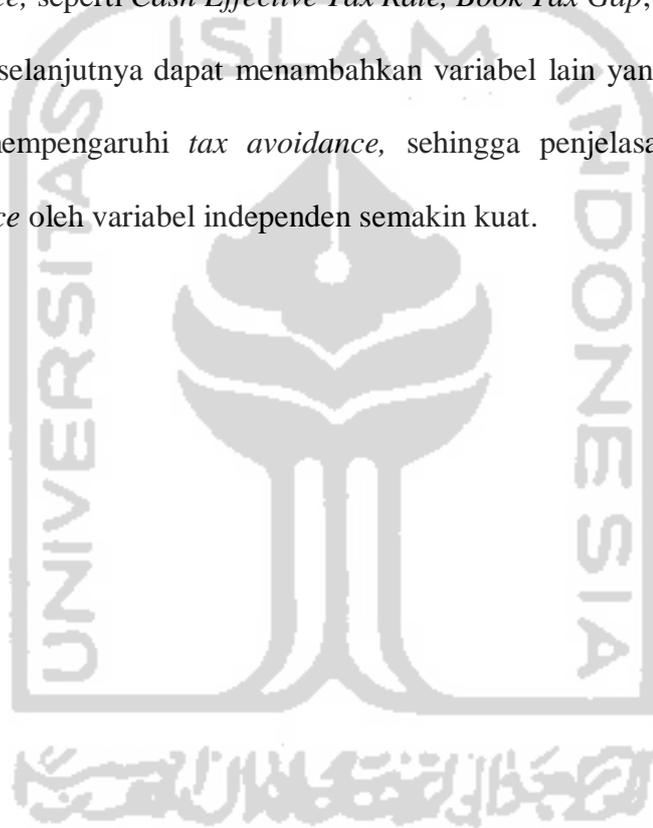
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan *Effective Tax Rate* untuk proksi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 0.312 atau 31,2% oleh variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *leverage*. Sedangkan sisanya yaitu 68,8% dijelaskan oleh faktor lain.

5.3 SARAN

1. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian karena kemungkinan perbedaan periode pengamatan akan memberikan hasil yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur *tax avoidance*, seperti *Cash Effective Tax Rate*, *Book Tax Gap*, dan lain-lain.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga penjelasan variabel *tax avoidance* oleh variabel independen semakin kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5(1). <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Bursa Efek Indonesia. (n.d.). Persyaratan Pencatatan Saham. Retrieved from <https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/News/FileDownload/PersyaratanPencatatan.pdf>
- Diantari, P., & Ulupui, I. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 1803–1820.
- Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Multivariate Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Govindarajan, R. N., & Anthony, V. (2007). *Management Control Systems* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran: *Diponegoro Journal of Accounting* 6(1), 1-12. ISSN (Online): 2337-3806
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. *Sar (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 2(2), 114. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591>
- Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644. ISSN: 2146-4138

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*, 162–176. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch17>
- Jingga, V., & Lina. (2017). Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange. *Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange*, 1(1), 17–25. Retrieved from www.ipjaf.omjpalph.com
- Jogiyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Laporan Realisasi APBN. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/>
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Mahanani, A., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548. ISSN: 2337-4349
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance : studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO*. 20(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Masnawaty, S. H. (2019). *Effect of Profitability and Size Companies on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*. 701–714. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4045>
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(E-ISSN 2581-1002), 84–92.
- Melani, A., & Tulus, B. Y. (2019). Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009. Retrieved from merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>

- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Mutamimah, & Rita. (2009). Keputusan Pendanaan: Pendekatan Trade-off Theory dan Pecking Order Theory. *Jurnal Ekobis*, 10, 241–249.
- Oktagiani, R. (2015). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *JOM Fekon*, 2(2).
- Oktavina, M., & Manalu, S. (2018). Pecking Order and Trade-off Theory in Capital Structure Analysis of Family Firms in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(1), 73–82. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i1.1793>
- Pohan, C. A. (2016). *Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pramudito, B., & Sari, M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 737–752.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Purwanti, M. S., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1)
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (10th ed.). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Riantami, V. L., & Triyanto, D. N. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Aksara Public*, 2(4), 23–35.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance,

profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>

Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.

Tandean, V. A. (2016). Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 07. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p07>

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., Pub. L. No. 16 (2009).

Undang-Undang Pajak Penghasilan., Pub. L. No. 36 (2008).

Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11(1).

Wikartika, I., & Fitriyah, Z. (2018). Pengujian Trade Off Theory dan Pecking Order Theory di Jakarta Islamic Index. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 10(2), 90. <https://doi.org/10.26740/bisma.v10n2.p90-101>

Winata, F. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. 4(1).

Yusdi, A. (2019). Saksi Kunci; Pembocor Skandal Pajak Sukanto Tanoto. Retrieved from <https://www.indonesiana.id/read/80481/saksi-kunci-pembocor-skandal-pajak-sukanto-tanoto>

Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 3543–3556.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Kode dan Nama Perusahaan

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2.	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk.
3.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4.	CTTH	Citatah Tbk.
5.	DEWA	Darma Henwa Tbk.
6.	ELSA	Elnusa Tbk.
7.	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk.
8.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
9.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
10.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.
11.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
12.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
13.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
14.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
15.	TINS	Timah Tbk.
16.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk.

Lampiran 2: Daftar Hasil Perhitungan ETR

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Beban Pajak (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)	ETR
1.	ADRO	2014	141820	325360	0,44
		2015	128970	279973	0,46
		2016	205834	546520	0,38
		2017	393093	929531	0,42
		2018	343457	820998	0,42
2.	ARTI	2014	3478130983	26599530803	0,13
		2015	858154242	11533831995	0,07
		2016	171445750	2326445289	0,07
		2017	3987607797	32871461999	0,12
		2018	12986988430	45792570511	0,28
3.	BSSR	2014	2657912	5191758	0,51
		2015	10106455	36482580	0,28
		2016	8170678	35592255	0,23
		2017	28871637	111688566	0,26
		2018	24291684	93354875	0,26
4.	CTTH	2014	282048000	644290370	0,44
		2015	2037784591	3987537336	0,51
		2016	5882926709	26764367473	0,22
		2017	2230868889	6947634696	0,32
		2018	4135779715	9340812634	0,44
5.	DEWA	2014	1911308	7645234	0,25
		2015	1237356	5432960	0,23
		2016	412610	2764875	0,15
		2017	2414980	10827703	0,22
		2018	1381626	6812382	0,20
6.	ELSA	2014	141609	559701	0,25
		2015	127993	507738	0,25
		2016	102252	418318	0,24
		2017	75612	326366	0,23
		2018	75491	351807	0,21
7.	ESSA	2014	3191910	13510193	0,24
		2015	1947846	6818590	0,29
		2016	90391	244885	0,37
		2017	1356262	5425045	0,25
		2018	5593002	14654314	0,38

8.	GEMS	2014	51854211562	185676112789	0,28
		2015	416800	1671981	0,25
		2016	13928488	48916736	0,28
		2017	47201636	167307676	0,28
		2018	34982119	135530697	0,26
9.	ITMG	2014	61812	262030	0,24
		2015	76339	139446	0,55
		2016	61282	191991	0,32
		2017	109352	362055	0,30
		2018	108607	367363	0,30
10.	KKG I	2014	4768230	12770508	0,37
		2015	3412817	9085030	0,38
		2016	5217011	14689875	0,36
		2017	6197032	19637007	0,32
		2018	644243	1119843	0,58
11.	MBAP	2014	3624947	17552006	0,21
		2015	12719462	47382528	0,27
		2016	9059580	36173315	0,25
		2017	20087158	78722858	0,26
		2018	17310612	67621314	0,26
12.	MYOH	2014	92668214	360967839	0,26
		2015	8755345	33487910	0,26
		2016	8194069	29452922	0,28
		2017	4710316	17016672	0,28
		2018	10518865	41447529	0,25
13.	PTBA	2014	655512	2674726	0,25
		2015	626685	2663796	0,24
		2016	709394	2733799	0,26
		2017	1554397	6101629	0,25
		2018	1736963	6858075	0,25
14.	RUIS	2014	22208701966	77914196902	0,29
		2015	27379440013	70030859016	0,39
		2016	27924392320	54852288151	0,51
		2017	16952556431	37874919864	0,45
		2018	17524863414	44579949867	0,39
15.	TINS	2014	345734	1023102	0,34
		2015	66602	168163	0,40
		2016	131921	414970	0,32
		2017	207297	716211	0,29
		2018	191669	766482	0,25

16.	TOBA	2014	18096721	53897225	0,34
		2015	13390302	39114397	0,34
		2016	11397421	25984193	0,44
		2017	18825618	60195507	0,31
		2018	29191826	97281622	0,30

Lampiran 3: Daftar Hasil Perhitungan Dewan Komisaris Independen

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0.40	0.40	0.40	0.40	0.25
ARTI	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
BSSR	0.33	0.33	0.33	0.43	0.33
CTTH	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
DEWA	0.40	0.33	0.33	0.40	0.40
ELSA	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ESSA	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50
GEMS	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ITMG	0.33	0.33	0.40	0.29	0.40
KKGI	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
MBAP	0.33	0.33	0.33	0.33	0.50
MYOH	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
PTBA	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
RUIS	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
TINS	0.20	0.33	0.33	0.20	0.20
TOBA	0.67	0.67	0.67	0.40	0.40

Lampiran 4: Daftar Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0.439112	0.439112	0.439112	0.439112	0.439112
ARTI	0.813474	0.865531	0.654274	0.447293	0.447293
BSSR	0.260000	0.260000	0.907412	0.907412	0.907412
CTTH	0.522167	0.522167	0.519050	0.572445	0.529103
DEWA	0.395145	0.392857	0.360826	0.301843	0.289580
ELSA	0.678592	0.683315	0.560034	0.560034	0.560034
ESSA	0.590909	0.590909	0.553485	0.652821	0.514244
GEMS	0.970000	0.970000	0.970000	0.970000	0.970000

ITMG	0.650567	0.701878	0.651434	0.651434	0.651434
KKGI	0.648596	0.648904	0.648884	0.691432	0.691158
MBAP	0.900000	0.900000	0.900000	0.900000	0.900000
MYOH	0.786885	0.786885	0.777431	0.777431	0.732106
PTBA	0.689050	0.710642	0.710642	0.710642	0.710642
RUIS	0.671388	0.930891	0.610528	0.597551	0.655212
TINS	0.650002	0.650002	0.650002	0.650002	0.650002
TOBA	0.931410	0.931410	0.931410	0.932619	0.932619

Lampiran 5: Daftar Hasil Perhitungan Kepemilikan Manajerial

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0.151224	0.131910	0.133285	0.122409	0.124001
ARTI	0.016200	0.009000	0.000500	0.003200	0.003200
BSSR	0.651086	0.009800	0.008820	0.000981	0.005019
CTTH	0.063099	0.065768	0.065609	0.065764	0.123824
DEWA	0	0	0	0	0
ELSA	0	0	0.000005	0.000005	0
ESSA	0.001026	0.001026	0.038103	0.169761	0.239750
GEMS	0	0	0	0	0
ITMG	0.000135	0.000153	0.000128	0.000933	0.000981
KKGI	0.003380	0.003397	0.003397	0.003489	0.003489
MBAP	0	0	0.007239	0.007239	0.007241
MYOH	0	0	0	0	0
PTBA	0.000028	0.000062	0.000027	0.000019	0.000012
RUIS	0	0	0	0	0
TINS	0.000075	0.000075	0.000002	0.000115	0.000115
TOBA	0.000027	0.000027	0.000027	0.000027	0

Lampiran 6: Daftar Hasil Perhitungan Komite Audit

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	3	3	3	3	3
ARTI	2	2	2	2	3
BSSR	2	3	3	3	3
CTTH	3	3	3	3	3

DEWA	3	3	3	3	3
ELSA	4	4	3	3	3
ESSA	3	3	3	3	3
GEMS	3	3	3	3	3
ITMG	4	4	4	4	4
KKGI	3	3	3	3	3
MBAP	3	3	3	3	3
MYOH	3	3	3	3	3
PTBA	4	4	3	3	4
RUIS	3	3	3	3	3
TINS	4	5	4	4	4
TOBA	3	3	3	3	3

Lampiran 7: Daftar Hasil Perhitungan Kualitas Audit

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0	0	0	0	0
ARTI	1	1	1	1	1
BSSR	1	1	1	1	1
CTTH	1	1	1	1	1
DEWA	1	1	1	1	1
ELSA	0	0	0	0	0
ESSA	0	0	0	0	0
GEMS	0	0	0	0	0
ITMG	0	0	0	0	0
KKGI	1	1	1	1	1
MBAP	0	0	0	0	0
MYOH	0	0	0	0	0
PTBA	0	0	0	0	0
RUIS	1	1	1	1	1
TINS	0	0	0	0	0
TOBA	0	0	0	0	0

Lampiran 8: Daftar Hasil Perhitungan Pertumbuhan Penjualan

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0.012	-0.193	-0.060	0.291	0.111
ARTI	-0.116	-0.369	-0.069	0.189	0.222
BSSR	0.297	0.193	-0.063	0.618	0.130
CTTH	-0.144	0.070	0.251	-0.156	0.207
DEWA	0.057	0.023	0.079	-0.063	0.137
ELSA	0.027	-0.106	-0.041	0.375	0.331
ESSA	-0.055	-0.014	-0.282	0.159	3.392
GEMS	0.171	-0.190	-0.088	0.976	0.376
ITMG	-0.108	-0.182	-0.140	0.235	0.188
KKGI	-0.298	-0.182	-0.166	-0.096	-0.320
MBAP	0.113	0.701	-0.146	0.382	-0.001
MYOH	0.232	-0.111	-0.160	-0.011	0.282
PTBA	0.167	0.050	0.015	0.385	0.087
RUIS	0.020	-0.913	-0.177	-0.145	0.154
TINS	0.260	-0.067	0.014	0.323	0.199
TOBA	0.185	-0.303	-0.259	0.203	0.411

Lampiran 9: Daftar Hasil Perhitungan *Leverage*

Perusahaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ADRO	0.968	0.777	0.723	0.665	0.641
ARTI	0.833	0.453	0.512	0.424	0.502
BSSR	0.863	0.657	0.445	0.402	0.631
CTTH	3.561	1.096	0.956	0.541	1.246
DEWA	0.375	0.659	0.694	0.766	0.798
ELSA	0.644	0.673	0.456	0.591	0.714
ESSA	0.394	0.518	2.183	2.877	1.856
GEMS	0.273	0.494	0.426	1.021	1.220
ITMG	0.456	0.412	0.333	0.418	0.488
KKGI	0.379	0.284	0.169	0.185	0.352
MBAP	0.741	0.478	0.270	0.315	0.397
MYOH	1.024	0.727	0.370	0.327	0.328
PTBA	0.708	0.819	0.760	0.593	0.486
RUIS	3.070	2.226	1.722	1.523	1.440
TINS	0.739	0.728	0.689	0.959	1.318
TOBA	1.112	0.820	0.771	0.993	1.328

Lampiran 10: Output SPSS Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	80	.07	.58	.3035	.10030
KIND	80	.20	.67	.3806	.09469
KINST	80	.26000	.97000	.6721043	.18971709
KMNJ	80	.00000	.65109	.0280777	.08494542
KOA	80	2	5	3.14	.522
KUA	80	0	1	.38	.487
SG	80	-.91	3.39	.0960	.45529
LV	80	.17	3.56	.8223	.62673
Valid N (listwise)	80				

Lampiran 11: Output SPSS Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08321163
	Absolute	.104
Most Extreme Differences	Positive	.104
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.931
Asymp. Sig. (2-tailed)		.352

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.036	.119		-.303	.763		
KIND	.048	.120	.046	.403	.688	.749	1.335
KINST	.040	.066	.076	.612	.542	.620	1.612
KMNJ	.629	.143	.532	4.408	.000	.656	1.525
KOA	.079	.025	.409	3.200	.002	.584	1.711
KUA	.029	.026	.141	1.118	.267	.600	1.666
SG	-.042	.023	-.189	-1.784	.079	.854	1.170
LV	.028	.016	.172	1.703	.093	.932	1.073

a. Dependent Variable: ETR

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00794
Cases < Test Value	40
Cases >= Test Value	40
Total Cases	80
Number of Runs	33
Z	-1.800
Asymp. Sig. (2-tailed)	.072

a. Median

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.038	.072		-.533	.596
	KIND	.120	.073	.206	1.659	.101
	KINST	-.025	.040	-.087	-.634	.528
	KMNJ	.118	.087	.182	1.366	.176
	KOA	.016	.015	.155	1.101	.275
	KUA	.031	.016	.275	1.980	.051
	SG	-.020	.014	-.164	-1.413	.162
	LV	.008	.010	.093	.836	.406

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran 12: Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LV, KIND, KUA, KMNJ, SG, KINST, KOA ^b		Enter

a. Dependent Variable: ETR

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.312	.245	.08716

a. Predictors: (Constant), LV, KIND, KUA, KMNJ, SG, KINST, KOA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.248	7	.035	4.660	.000 ^b
	Residual	.547	72	.008		
	Total	.795	79			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), LV, KIND, KUA, KMNJ, SG, KINST, KOA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.036	.119		-.303	.763
	KIND	.048	.120	.046	.403	.688
	KINST	.040	.066	.076	.612	.542
	KMNJ	.629	.143	.532	4.408	.000
	KOA	.079	.025	.409	3.200	.002
	KUA	.029	.026	.141	1.118	.267
	SG	-.042	.023	-.189	-1.784	.079
	LV	.028	.016	.172	1.703	.093

a. Dependent Variable: ETR